

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

JARINGAN KOMUNIKASI GERAKAN AKSI 212

A. Komunikasi vertikal dalam gerakan aksi 212

Setelah peneliti melakukan penelitian di kediaman Abuya Ahmad Qurtubi Jaelani dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara dapat di paparkan temuan penelitian sebagai berikut:

Distribusi indikator jaringan komunikasi kelompok yang diterapkan masyarakat pada gerakan 212 dapat dilihat melalui indikator yang ditunjukkan bahwa jaringan yang tertinggi adalah *opinion leader* dan yang terendah adalah *cosmopolite*. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan gerakan 212 yang meliputi ketua-ketua ormas masing-masing wilayah, hingga koordinator aksi/lapangan memiliki peran yang besar dalam suatu jaringan komunikasi. Sedangkan distributor indikator yang menunjukkan solidaritas pada gerakan 212 dapat dilihat bahwa indicator solidaritas gerakan ini paling tinggi adalah *social control* dan paling rendah

adalah kepercayaan dan sifat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan aksi yang digelar masyarakat merupakan suatu *social control* terhadap permasalahan umat maupun kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan umat islam.

Untuk melihat pengaruh jaringan komunikasi terhadap solidaritas dalam gerakan 212 maka perlu dilakukan penelitian regresi linear sederhana yang dapat dilihat berdasarkan hasil analisa yang didapat. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima karena gerakan ini dimaknai sebagai komunikasi politik pada umat beragama dalam merespon fenomena sosial kebangsaan dan kerukunan umat beragama yang terjadi belakangan ini. Indikasi bentuk diskriminasi yang ditujukan kepada umat islam semakin terlihat. Kemajemukan yang sudah dipupuk Nampak gersang oleh nafsu politik dan kepentingan suatu golongan tertentu. Dalam hal ini, masyarakat sebagai kontrol sosial hanya ingin mengkomunikasikan kepada pemerintah

bahwa masyarakat ingin meminta keadilan baik secara penegakan hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam komunikasi vertikal yang langsung di komandoi oleh Habib Rizieq Shihab kemudian beliau memerintah kepada seluruh pimpinan cabang di setiap provinsi untuk mengatur keadaan massa di lapangan, dan dari setiap pimpinan cabang kemudian memerintahkan kepada setiap koordinator lapangan agar mengatur massa demi berlangsungnya aksi damai 212

B. Komunikasi horizontal dalam gerakan aksi 212

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan melalui hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka peneliti melakukan analisa hasil temuan dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun teori yang baru serta menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian tentang *Jaringan Komunikasi Gerakan Pada Aksi 212*.

a. Politik Identitas

Politik identitas merupakan suatu alat yang digunakan oleh suatu kelompok tertentu seperti etnis, suku, budaya, agama atau kepentingan-kepentingan lainnya. Politik identitas biasanya dijadikan sebagai alat perlawanan untuk menunjukkan jati diri dari suatu kelompok tertentu.

Menarik kejadian yang terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu lalu, alasan agama menjadisuatualasan yang dijadikan alat dalam perilaku politik yang digunakan untuk tujuan tertentu.

Identitas budaya yang dominan juga bias menjadi pengaruh terhadap budaya pendatang, serta mayoritas dan minoritas. Yang selanjutnya kelompok minoritas menjadi terpengaruh terhadap adanya mayoritas yang masuk lebih banyak akibat dari tekanan-tekanan yang terjadi di lingkungan sendiri.

Citra diri dan harga diri yang tercipta karena adanya identitas politik agama yang dikaitkan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta menjadi berpengaruh pada arena

pemilihan gubernur Jakarta. Salah satu sentiment yang terbangun dalam politik ini adalah citra diri yang merasa terhina atas ucapan Ahok yang dilontarkan pada kampanyenya di Kepulauan Seribu yang berujung pada terciptanya aksi 411 dan 212.

Selanjutnya, sentiment terhadap harga diri yang membentuk suatu sikap solidaritas kelompok yang disebabkan oleh tajamnya pada pemilihan gubernur DKI Jakarta dalam dua pilihan yakni pilihan muslim dan non muslim. Dua kondisi ini yang menyebabkan terciptanya bentuk slogan bahwa saya muslim-saya memilih Anies menjadi mengemuka, sehingga menonjolkan adanya bentuk politik identitas keagamaan.

b. Jihad Alternatif: Amar Makruf Nahi Munkar

Jihad merupakan suatu bentuk kesungguhan atau kekuatan untuk menegakkan sesuatu yang dianggap salah. Konsep jihad terbagi menjadi 4 yakni, jihad harta, jihad jiwa, jihad politik dan jihad pengetahuan. Berdasarkan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh

Basuki Thajaja Purnama (Ahok) mendorong masyarakat muslim bersatu untuk berjihad dalam bentuk politik.

Jihad politik dinilai jihad yang paling utama. Hal ini dikarenakan bentuk jihad yang bertujuan untuk meluruskan penyelewengan yang dilakukan oleh para penguasa, yang dalam hal ini dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta (Ahok). Atas kekuasaannya, Ahok berpidato dalam kampanyenya yang menyatakan bahwa “Masyarakat telah dibohongi oleh Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 51” yang memiliki arti bahwa umat muslim dilarang untuk memilih pemimpin yang non muslim. Dalam pidatonya yang berisikan bentuk penistaan agama menyebabkan keresahan dan kemarahan bagi umat islam di Indonesia. Selanjutnya, kekuasaan atau pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini menjadi peranan penting dan strategis. Jika kekuasaan dipegang oleh tangan penguasa yang tidak adil dan menyeleweng, maka masyarakat akan dipaksa dengan berbagai cara untuk melakukan penyelewengan yang diaper buat. Jihad

dalam politik juga bertujuan untuk menegakkan amarma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang telah diajarkan oleh ulama terdahulu. Maka dari itu, jihad politik merupakan bentuk sentral dalam aksi menegakkan para penguasa yang menyeleweng.

Aksi super damai 411 dan 212 merupakan suatu bentuk jihad politik yang dilakukan umat muslim di Indonesia dalam menegakkan amarma'ruf nahimungkar di Indonesia. Aksi bela islam jilid II merupakan bentuk lanjutan aksi 411 yang dilakukan pada bulan November 2016. Aksi ini disebut sebagai bentuk parade jihad islam dalam menuntut ketidakadilan yang dirasakan umat muslim di Indonesia. Dalam hal ini, Front Pembela Islam (FPI) sangat tegas dalam menegakkan amarma'ruf nahimungkar yang terdiri dari bentuk dakwah, hisbah dan jihad.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analityc deskriptif (pemaparan) yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam komunikasi horizontal selaku pemimpin dari FPI yaitu Habib Rizieq Shihab tidak di libatkan karena komunikasi horizontal hanya melibatkan sesama pimpinan cabang setiap provinsi atau kota serta setiap koordinator setiap wilayah atau koordinator lapangan dan para peserta aksi agar kondusif.

C. Data Wawancara dengan responden

Untuk mengetahui jaringan vertical dan horizontal pada gerakan aksi 212, peneliti mencoba menggali informasi melalui wawancara dengan beberapa petinggi dan pengurus ormas Islam FPI.

1. Buya Ahmad Qurthubi Jaelani, pimpinan ponpes Al-Futuhiyah serta Imam FPI Banten

“Aksi bela islam merupakan bentuk keresahan umat islam terhadap penistaan umat islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Aksi ini digelar pada tanggal 2 Desember 2016 atau saat ini dikenal dengan gerakan aksi 212. Berdasarkan keresahan umat islam terhadap apa yang dilakukan oleh Ahok, gerakan

ini mampu menghadirkan umat islam dari berbagai daerah di Indonesia.

Demo ini dihadiri sekitar tiga juta peserta dari kalangan umat islam yang turut andil untuk melaksanakan orasi dan doa bersama. Gerakan ini didahului dengan aksi unjuk rasa yang digelar pada tanggal 4 Novermber 2016 yang dipicu oleh keresahan dan kemarahan umat islam terhadap penggunaan Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 51 yang diutarakan oleh Ahok dalam kampanyenya di Kepulauan Seribu lalu. Perkataan yang diutarakan dalam kampanye tersebut dinilai menistakan agama islam karena menyebutkan bahwa pemilih beragama islam dalam Pilgub DKI tersebut “dibohongi dengan ayat yang tercantum dalam surat Al Maidah”. Aksi ini mendapat perhatian yang besar dari banyak media di berbagai dunia.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, bahwasanya aksi 212 dipicu oleh adanya perlakuan penistaan agama yang dilakukan oleh calon

gubernur DKI Jakarta pada kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Dia menilai bahwasanya apa yang Ahok utarakan mengandung bentuk penistaan agama terhadap Surat Al Maidah ayat 51, sehingga memicu keresahan dan kemarahan umat islam di Indonesia.

2. Kyai Nasehuddin, ketua FPI kota serang

“Aksi Bela Islam 212 yang mampu mengumpulkan jutaan peserta hingga memadati Monas dan jalan-jalan utama di Jakarta pusat tentu menjadi sebuah peluang bagi media untuk meliput. Kehadiran sejumlah tokoh Nasional dan elit politik partai menjadikan aksi demonstrasi ini sangat menarik untuk diliput dan didebatkan. Berbagai media baik media cetak, elektronik hingga dalam jaringan (daring), dari yang mainstream hingga underground mempunyai sudut pandang tersendiri dalam pemberitaan mereka. Sudut pandang ini yang kita kenal sebagai pembingkaiian atau dalam teorinya disebut framing.”

Menurut informasi yang disampaikan oleh informan, dapat ditarik pernyataan bahwa aksi ini menjadi sebuah peluang bagi media untuk meliput. Hal ini menunjukkan bahwa, komunikasi yang dilakukan melalui media massa dapat menggiring opini masyarakat dan menarik massa yang lebih banyak untuk ikutan dildalamaksi 212.

3. Kiai Enting Abdul Karim, Tokoh ulama Banten

Aksi massa 212 tidak termasuk dalam kategori aktif maupun pasif dalam merespons kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan lahirnya aksi massa 212 sama sekali tidak ada kaitannya dengan merespons atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Aksi massa 212 lebih bersifat reaktif terhadap sikap personal yang dinilai telah berbuat tidak elok sebagai person maupun pemimpin sebuah embaga yang sikapnyat ersebut meresahkan sejumlah masyarakat tertentu. Jika dilihat dari jenisnya partisipasi politik masyarakat dalam konteks aksi massa 212 termasuk dalam kelompok jenis "Anomi". Mereka berangkat membentuk sebuah

komunitas baru atas dasar kesamaan rasa kecewa terhadap pernyataan Basuki, Gubernur Jakarta saat itu yang dianggap menistakan agama Islam.”

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Kiai Enting Abdul Karim bahwasanya aksi ini bukan merupakan aksi yang pasif maupun massif. Menurutnya, aksi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan merespon atau mengkritisi pemerintahan.

Masyarakat mengetahui terjadinya aksi ini karena dipicu oleh adanya bentuk penistaan agama dan aksi yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 4 november 2016 lalu. Aksi tersebut merupakan titik mula terjadinya pergerakan besar yang dilakukan oleh massa umat islam di Indonesia untuk menuntut tegas pelaku penistaan agama.

4. Haris Dliaurrahman, Ustadz di Pondok Pesantren Sabilurrahman Walantaka (Aktifisgerakan 212)

“Aksi yang digelar di Monumen Nasional Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 lalu merupakan aksi

yang dihadiri oleh banyak massa dari umat islam yang memiliki tujuan untuk “menyingkirkan” calon gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Thajaja Purnama (Ahok). Pasalnya, Ahok dinilai telah menistakan agama Islam saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya, Ahok mengungkapkan bahwa ada sejumlah oknum yang memprovokasi masyarakat untuk tidak member dukungan kepadanya dengan menggunakan dalih Surat Al-Maidah ayat 51. Maka dari itu, atas kegelisahannya terhadap oknum tersebut, Ahok menyampaikan pidatonya pada saat kunjungan tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan saat wawancara, bahwasanya aksi ini dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap bentuk penistaan yang dilakukan oleh Ahok. Masyarakat menilai Ahok tidak pantas menjadi gubernur pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, sehingga massa bertujuan untuk menyingkirkan Ahok dalam pemilihan gubernur tersebut dan menuntut aparat

urhuk umum tuk memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penistaan agama.

5. Hendra, Aktifis FPI Kota Serang

“Salah satu sosok sentral dalam aksi ini adalah Bachtiar Nasir, yang tak lain adalah ketua dari forum GNPF-MUI. Sesuai namanya, GNPF-MUI dibentuk tak lama setelah MUI menyatakan sikap keagamaan terkait ucapan Ahok waktu lalu. MUI menyatakan sikap keagamaan, bahwa pernyataan Ahok termasuk kedalam penistaan terhadap Alquran dan atau menghina ulama. Fatwa MUI juga meminta, aparat penegak hukum wajib memberikan Tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Sikap dan pernyataan ini kemudian menjadi landasan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Aksi Bela Islam yang dilaksanakan pada 2 Desember 2016 itu telah menorehkan sejarah gerakan sosial yang melibatkan massa massif dengan ragam corak latar belakang masyarakat Indonesia. Di sisi lain, aksi 212 juga menjadi pembuktian kekuatan media social dapat

dengan mudah membentuk sikap solidaritas dan mobilisasi jutaan umat Islam di Indonesia. Aksi 212 seperti menghidupkan kembali keutuhan dan persatuan umat Islam yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri. Perjuangan massa paska aksi 212 dalam menyuarkan keadilan dan kepentingan umat masih dirasakan oleh umat Islam hingga hari ini.

Aksi 411 dan 212 dilatar belakangi oleh isi pidato Basuki Thjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu dan diperkeruh dengan salah satu unggahan Buni Yani di facebook yang dianggap berpotensi menciptakan pergolakan public karena video yang diunggahnya melalui akun facebooknya. Kasus penistaan ini menjad ikabar terpopuler di media sosial pada tahun 2016 menurut survey yang diunggah oleh Digitroops. Salah satu reaksi yang muncul dari kasus ini adalah Aksi Damai 411 dan 212 yang melibatkan jutaan partisipan umat muslim dari seluruh wilayah di Indonesia. Sejumlah massa yang ikut terlibat dalam aksi ini

didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi pada semboyan “Bela Islam” terhadap dugaan adanya upaya penistaan Al Quran Surat Al Maidah oleh Ahok, sehingga massa rela berkorban untuk bias ikut serta dalam Aksi 212 di Jakarta. Aksi 212 ini dimotori oleh beberapa ulama ternama seperti Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, AA Gym, dan Arifin Ilham.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu aktifis FPI bahwa pada aksitersebut MUI menyatakan suatu skap keagamaan yang tertuju pada penegakkan hokum terhadap pelaku penistaan agama. Dia menilai bahwasanya gerakan ini didorong oleh sikap solidaritas berlandaskan “*Bela Islam*” dan keikutsertaan media dalam menarik massa untuk bersatu menciptakan sikap solidaritas dan keutuhan umat islam di Indonesia.

6. Muhtaruddin Hassan, Ustadz Pengasuh Pondok Pesantren Sabilu El-Muhtadin Pandeglang (Aktifis Pergerakan 212).

“Aksi belaislam yang dikenal dengan Aksi 212 pada 2 Desember 2016 lalu merupakan suatu bentuk kulminasi dari gerakan turun kejalan untuk menuntut proses hokum terhadap calon gubenuur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok). Gerakan massif yang digelar di halaman Monumen Nasional (Monas) ini dihadiri oleh sejumlah umat Muslim dari berbagai masyarakat muslim di Indonesia. Zaitun Rasmin yang tak lain adalah Wakil Ketua GNPF MUI menyebutkan bahwa aksi demo yang diisi denga norasi kebangsaan dan doa bersama ini dihadiri sekitar tiga juta peserta dari seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Gerakan ini dipicu oleh kemarahan umat muslim terhadap penistaan agama yang dilakukancalongubernur DKI Jakarta pada pidatonya tersebut. Aksi ini pertama kali digelar pada tanggal 4 November 2016 lalu dan menjadi semangat umat muslim untuk bersatu mendapatkan keadilan terhadap kerukunan umat beragama. Masyarakat menganggap bahwa ini akan menjadi suatu

awal terjadinya kesenjangan kerukunan antar umat beragama.

Muhtarudin Hasan menilai bahwa aksi ini merupakan bentuk kulminasi dari gerakan turun kejalan untuk menuntut proses hokum terhadap pelaku penistaan agama. Aksi ini diisi dengan orasi kebangsaan keagamaan dan doa bersama yang digelar di halaman Monumen Nasional, Jakarta. Dia menilai bahwa aksi 212 merupakan bentuk aksi lanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada bulan November lalu. Selain menegakkan keadilan terhadap pelaku penistaan agama, dia bersyukur bahwa pada aksi ini dapat menjadikan umat muslim di Indonesia dapat bersatu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

D. Hasil Penelitian

1. Komunikasi Vertikal pada Gerakan Aksi 212

Komunikasi secara vertikal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi vertikal yang terjadi

pada gerakan aksi 212 merupakan komunikasi yang terjadi antara pimpinan ormas yang bersatu menegakkan keadilan terhadap pelaku penistaan agama yang disampaikan kepada setiap anggotanya.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara mengenai komunikasi secara vertikal yang terjadi sebelum adanya aksi 212 tersebut dipicu oleh adanya kabar mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok) pada kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Hal ini memicu para pimpinan ormas islam bersama anggotanya untuk memberikan tindakan tegas kepada setiap pelaku penistaan agama yang terjadi di Indonesia.

2. Komunikasi Horizontal pada Gerakan Aksi 212

Komunikasi horizontal adalah bentuk komunikasi yang menunjukkan adanya pertukaran informasi kesamping. Komunikasi ini terjadi sesuai dengan prinsip fungsional antara orang-orang yang sama dalam suatu

organisasi. Komunikasi secara horizontal dalam aksi 212 terjadi antara hubungan anggota dengan anggota lainnya, ataupun anggota dengan elemen masyarakat yang dengan cepat menerima formasi melalui sumber-sumber lainnya.

Media massa elektronik merupakan media digital masa kini yang menyediakan berbagai informasi terkini menjadi salah satu sumber terbentuknya komunikasi secara horizontal. Dalam hal ini, media massa berperan sebagai penyalur informasi kepada masyarakat umum. Opini yang disajikan dalam pemberitaan, baik melalui cara tradisional maupun modern mampu menggiring persepsi masyarakat terhadap keresahan publik yang terjadi. Sehingga, menyebabkan pergejolakan masyarakat untuk menuntut keadilan.

Masyarakat umum juga menjadi peran penting dalam terbentuknya komunikasi horizontal pada aksi 212. Informasi yang tersebar dengan cepat melalui mulut kemulut juga mampu menggiring opini public untuk

bertindak tegas terhadap pelaku penistaan agama yang terjadi di Indonesia.